

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan upaya yang sangat penting dalam membangun karakter bangsa. Salah satu komponen utama dalam pendidikan di Indonesia adalah pengajaran nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai penting yang perlu ditanamkan sejak dini kepada siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Nilai-nilai tersebut meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Wiyani (2013: 25) dalam (Subekti et al., 2016) berpendapat bahwa karakter ini merupakan kekuatan atau kualitas, moral atau mental, moralitas atau tingkah laku seseorang yang dapat membentuk kepribadian tertentu, agar menjadi penggerak serta bisa membedakannya dengan individu yang lain. Oleh karena itu, pendidikan berbasis karakter harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran di sekolah untuk mencetak manusia berkualitas yang siap adanya persaingan dalam masyarakat ekonomi ASEAN.

Landasan filosofis tesis ini bertumpu pada nilai-nilai dasar pendidikan dan filsafat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang bersifat universal namun tetap kontekstual sesuai budaya lokal.

Filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman peserta didik sangat sejalan

dengan pemanfaatan kearifan lokal. Pendidikan Pancasila tidak cukup disampaikan secara dogmatis, namun perlu ditanamkan melalui pengalaman hidup sehari-hari yang bermakna yang dalam hal ini dapat diwujudkan melalui kearifan lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran kearifan lokal dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa sekolah dasar. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif dan kontekstual dalam pendidikan karakter berbasis Pancasila. Menurut Kahfi & Binamadani (2019) bahwa melalui pendidikan kewarganegaraan kajian dan materi instruksional menjadi penunjang keberadaban siswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang cinta tanah air. Namun, dalam pemahaman konsep Pancasila seringkali tidak mencapai tingkat yang memadai di kalangan pelajar. Maka perlu adanya strategi pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan realitas lokal agar nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi dengan baik.

Landasan normatif berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mendukung integrasi kearifan lokal dan nilai Pancasila dalam pendidikan, antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3): “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...” UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa... berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Permendikbud No. 20 Tahun 2018

tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang mengarahkan agar nilai-nilai karakter termasuk gotong royong, nasionalisme, dan religiusitas ditanamkan melalui budaya sekolah, termasuk melalui pendekatan lokal. Permendikbudristek No. 56/M/2022 tentang Kurikulum Merdeka, yang memberikan ruang luas untuk konteks lokal dalam pembelajaran.

Landasan teoritis mendukung argumen akademik dan pendekatan yang digunakan. Teori-teori yang relevan antara lain:

a. Teori Konstruktivisme (Jean Piaget & Vygotsky)

Teori konstruktivisme berpandangan bahwa pengetahuan tidak diterima begitu saja dari guru, melainkan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman nyata dan interaksi sosial. Jean Piaget menekankan pentingnya aktivitas konkret dan pengalaman langsung dalam membangun skema kognitif anak, sementara Vygotsky menambahkan bahwa pembelajaran juga terjadi secara optimal melalui interaksi sosial dan budaya, termasuk melalui bimbingan orang dewasa atau teman sebaya dalam apa yang disebut sebagai *zona perkembangan proksimal*. Dalam konteks ini, kearifan lokal berperan sebagai jembatan yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan melalui kegiatan yang berakar pada tradisi, budaya, dan kebiasaan lokal yang sudah akrab bagi siswa, seperti gotong royong, upacara adat, cerita rakyat, dan permainan tradisional. Pengalaman belajar yang berbasis kearifan lokal memungkinkan siswa untuk lebih mudah memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, karena mereka tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga secara afektif dan sosial dalam lingkungan yang bermakna.

Dengan demikian, penggunaan kearifan lokal dalam pembelajaran sesuai

dengan prinsip konstruktivisme, karena memberikan konteks nyata, mendorong partisipasi aktif, dan memperkuat pembelajaran melalui interaksi sosial yang bermakna.

b. Teori Nilai (Spranger dan Rokeach)

Teori nilai berfokus pada bagaimana nilai terbentuk, dihayati, dan memengaruhi perilaku individu. Menurut Eduard Spranger, nilai merupakan bagian dari kepribadian yang terbentuk melalui pengalaman hidup dan lingkungan budaya. Sementara itu, Milton Rokeach mendefinisikan nilai sebagai keyakinan yang diyakini secara mendalam, yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Nilai bersifat stabil dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan moral dan sosial.

Dalam konteks pendidikan Pancasila, nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan tidak cukup hanya diajarkan secara teoritis, tetapi perlu dihidupkan dalam tindakan nyata. Kearifan lokal menyediakan sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut melalui narasi budaya dan praktik kehidupan masyarakat. Misalnya, tradisi gotong royong dalam membangun rumah atau membersihkan lingkungan merupakan cerminan nyata nilai kebersamaan dan solidaritas. Cerita rakyat atau legenda lokal dapat memuat pesan moral tentang keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan yang dapat diteladani siswa.

Dengan demikian, penerapan kearifan lokal dalam pembelajaran nilai-nilai Pancasila sejalan dengan teori nilai yang menekankan pentingnya pengalaman konkret, keyakinan yang tertanam, serta keterlibatan emosional dan sosial dalam pembentukan karakter siswa.

c. Teori Sosial Kultural (Lev Vygotsky)

Teori Sosial Kultural yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif individu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan konteks budaya di sekitarnya. Menurut Vygotsky, proses belajar tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya tempat individu hidup. Bahasa, simbol, tradisi, dan nilai-nilai yang ada dalam budaya menjadi alat utama dalam membentuk cara berpikir dan memahami dunia.

Dalam konteks pembelajaran nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal berfungsi sebagai media kultural yang sangat efektif. Melalui budaya lokal, seperti upacara adat, cerita rakyat, permainan tradisional, dan kebiasaan sosial, siswa diajak untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai seperti persatuan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong. Budaya lokal tidak hanya memperkaya konteks pembelajaran, tetapi juga menjadikannya lebih bermakna karena bersumber dari lingkungan yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari.

Dengan menggunakan kearifan lokal sebagai pendekatan, pembelajaran nilai-nilai Pancasila menjadi lebih kontekstual dan sesuai dengan pandangan

Vygotsky bahwa budaya adalah landasan utama dalam perkembangan kognitif dan sosial anak

#### d. Teori Pendidikan Multikultural (Banks)

Mendorong penggunaan latar belakang budaya peserta didik dalam pembelajaran agar lebih bermakna dan relevan secara identitas saat ini berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi semakin global sehingga dalam menguasai dan mengarahkannya dengan benar dibutuhkan generasi anak bangsa yang memiliki sikap perilaku, kemampuan dan kompetensi yang luar biasa. Pendidikan merupakan basis yang diperlukan di era globalisasi saat ini. Sistem pendidikan nasional di perbatasan menghasilkan orang-orang berkualitas yang menurut sebagian orang, akan menempati posisi yang sesuai dengan bidang keahliannya di semua industri dan di masyarakat. Akan tetapi, adanya banyak asumsi yang akan diikuti oleh sistem pendidikan kita adalah sumber daya manusia yang berkualitas rendah dan akan terus menabur kerusakan moral dalam menanggapi krisis keragaman, mengurangi dan mencegah krisis multidimensi, terutama dalam menghadapi sikap atau perilaku yang tidak etis di Masyarakat (Ngimadudin, 2021).

Pengertian konsep dan pelaksanaan pendidikan nasional yang diperlukan, yang bercirikan pendidikan yang konsisten dari landasan filosofis, ke pendidikan sistematis dan pendidikan praktis. Dalam proses pendidikan, mereka mengikuti pendidikan dianggap sebagai individu yang memiliki potensi moral, mental, fisik, sosial dan emosional dengan karakter yang unik (Fahrozy et al.,2022). Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan pengetahuan,

wawasan, nilai dan karakter meskipun ada yang diwarisi dari budaya. Model pendidikan baru tersebut disampaikan melalui struktur pelaksanaan program sekolah, khususnya program untuk menggalakkan transisi satuan pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yang mengikuti pendidikan yang baik dari segi kompetensi kognitif (literasi dan komputasi) dan non- kognitif (karakter) untuk mencapai Profil Pelajar Pancasila (Mutiara et al., 2022).

Profil pelajar Pancasila menjadi tujuan utama yang dilakukan oleh para pengembang Pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum oleh pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 (Kusumah & Alawiyah, 2021). Profil pelajar pancasila menurut (Kemendikbud, 2021; Racmawati et al., 2022) ada 6 profil yang menjadi kompetensi inti dalam mewujudkan profil pelajar pancasila. diantaranya: 1) beriman, bertaqwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia; 2) mandiri; 3) bernalar kritis; 4) kreatif; 5) bergotong royong; 6) berkebinekaan global.

Landasan empiris mengacu pada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Beberapa temuan yang bisa digunakan: Penelitian oleh Utami (2020) menunjukkan bahwa integrasi cerita rakyat dalam pembelajaran PPKn di SD meningkatkan pemahaman nilai gotong royong dan toleransi. Studi oleh Rahmawati & Widodo (2021) menemukan bahwa penggunaan budaya lokal seperti permainan tradisional dan upacara adat mampu menanamkan nilai kerja sama dan tanggung jawab kepada siswa sekolah dasar.

Namun, dalam implementasinya, pengajaran nilai-nilai Pancasila seringkali hanya dilakukan secara teoritis melalui buku teks dan cenderung kurang kontekstual. Siswa hanya diajarkan untuk menghafal konsep tanpa menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Kearifan lokal, yang merupakan bagian dari budaya dan identitas suatu daerah, memiliki potensi besar untuk menjadi sarana pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Melalui kearifan lokal, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai luhur yang sesuai dengan konteks budaya mereka, sehingga pengajaran nilai-nilai Pancasila menjadi lebih konkret, relevan, dan bermakna.

Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman di negara kita harus mampu mendukung keberlangsungan kearifan lokal (Umami, 2020). Kearifan lokal juga dapat berarti pengikat atau kesatuan yang mengikat. Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonseptualisasikan sebagai kebijakan kecerdasan lokal, kearifan lokal atau informasi lokal yang terkait dengan kearifan lokal merupakan identitas atau budaya kepribadian suatu negara yang menjadikan bangsa-bangsa terserap, bahkan dari budaya aslinya. Asing/negara lain adalah karakter dan kapasitas itu sendiri. Identitas alam dan adaptasi alam dengan setting publik sekitar sehingga tidak melakukan perubahan kecepatan (Marfai, 2019). Kearifan lokal adalah makna dalam budaya yang mengolah dan memelihara budaya asing itu tidak baik.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membatasi hal-hal sebagai berikut:

1. Peneliti fokus pada peran nilai nilai Pancasila di sekolah dasar.

2. Subjek penelitian ini siswa sekolah dasar.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kearifan lokal yang dapat digunakan dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa sekolah dasar?
2. Bagaimana peran kearifan lokal dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengintegrasian kearifan lokal dalam pengajaran nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang dapat digunakan dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa sekolah dasar.
2. Menganalisis peran kearifan lokal dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengintegrasian kearifan lokal dalam pengajaran nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

**a. Manfaat Teoretis**

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan karakter berbasis Pancasila.
2. Menambah referensi akademik mengenai pentingnya kearifan lokal dalam pembelajaran nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar.

**b. Manfaat Praktis**

1. Bagi Guru: Memberikan alternatif metode pengajaran yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila.
2. Bagi Siswa: Meningkatkan pemahaman siswa mengenai nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang sesuai dengan budaya lokal.
3. Bagi Sekolah: Menjadi bahan evaluasi dalam mengintegrasikan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan karakter.

**F. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kearifan Lokal: Nilai-nilai, norma, tradisi, adat, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat setempat dan mengandung nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun.
2. Nilai-nilai Pancasila: Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

3. Sekolah Dasar: Jenjang pendidikan formal di Indonesia yang mencakup kelas 1 hingga kelas 6, dengan siswa berusia antara 6 hingga 12 tahun.